

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu dari beberapa negara yang menggunakan pendapatan pajak sebagai sumber pendapatan di negaranya. Pajak merupakan pendapatan terbesar negara, oleh karena itu pemerintah berupaya untuk meningkatkan jumlah pendapatan dari sektor yang sangat potensial ini, masyarakat berperan penting dalam membayar pajak sehingga dituntut kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya. Terlepas dari kesadaran sebagai warga negara, sebagian besar masyarakat tidak memenuhi kewajiban dalam membayar pajak, yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang (Rizky et al., 2014).

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan pendapatan atau penerimaan yang diterima oleh suatu daerah melalui sumber yang ada di dalam daerah itu sendiri yang pemungutannya sesuai dengan Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang ada dan telah ditetapkan di Indonesia, PAD juga merupakan sumber pendapatan daerah yang bebas digunakan oleh masing-masing daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah. Salah satu komponen yang memiliki peran penting dalam kontribusi penerimaan PAD adalah pajak daerah. Pajak Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang sangat penting untuk pembiayaan daerah dalam memantapkan otonomi daerah yang nyata, serasi, dinamis dan berkembang, dan pajak daerah menjadi salah satu sumber utama PAD karena kontribusinya dalam meningkatkan pendapatan pemerintah daerah untuk pembiayaan berbagai program dan proyek pembangunan. Keberadaan Pajak

daerah harus ditentukan target yang diperoleh setiap tahunnya. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan realisasi penerimaan pajak daerah itu sendiri karena pajak daerah akan optimal sebagai kontribusi PAD apabila realisasinya dapat melebihi target yang telah ditetapkan, (Apriani, 2012).

Adanya keterlambatan masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah, maka akan berpengaruh terhadap pertumbuhan penerimaan pendapatan PAD, jika PAD rendah hal ini dapat menghambat kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan layanan publik yang memadai dan membiayai pembangunan di wilayahnya serta dapat memperlambat pelaksanaan otonomi daerah, oleh karena itu pemerintah harus bisa melihat atau menganalisis pertumbuhan penerimaan pendapatan PAD, jika terjadi penurunan dari penerimaan pendapatan PAD pemerintah dapat melakukan program penyuluhan atau edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak dan retribusi secara tepat waktu, edukasi dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan kewajibannya serta konsekuensi jika tidak mematuhi peraturan tersebut,

Berdasarkan Undang – Undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain PAD yang sah. Dari berbagai macam sumber penerimaan yang dipungut oleh daerah, undang-undang tentang pemerintahan daerah menetapkan pajak daerah dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan daerah yang dapat dikembangkan oleh masing-masing daerah. Menurut Sidik (2002) upaya peningkatan pertumbuhan PAD dapat dilakukan dengan intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi yang sudah ada.

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Padang merupakan kantor instansi pemerintahan yang berfungsi sebagai pengelola sumber pendapatan daerah yang mempunyai tugas dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang Pendapatan Daerah. Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Daerah dipungut Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Padang dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah yang sekaligus berguna mengatur dan menertibkan Wajib Pajak selaku Objek Pajak di wilayah Kota Padang. Menurut Nini dan Monica (2018) Sumber pajak daerah tersebut diharapkan menjadi alternatif pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang nantinya akan digunakan untuk kesejahteraan rakyat.

Dana yang diperoleh dari penerimaan pajak digunakan untuk kebutuhan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan Kota. Jika tidak ada pajak, suatu negara atau wilayah akan kesulitan untuk maju dan mencapai perbaikan. Oleh karena itu, peningkatan penerimaan pajak menjadi suatu keharusan yang tidak dapat diabaikan oleh pemerintah. Selain itu, pemberian wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola kebutuhan masyarakatnya sendiri, yang dikenal sebagai otonomi daerah, menjadi landasan penting. Otonomi daerah bukan hanya sebuah konsep, tetapi juga

merupakan tujuan strategis pemerintah untuk mencapai pemerataan pembangunan di berbagai daerah. Kebijakan Pemerintah Daerah membuka peluang bagi setiap daerah untuk menggali potensi sumber PAD, menciptakan landasan yang kokoh untuk pengembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara merata (Safitri, 2021).

Menurut Safitri (2021) agar terpenuhi suatu kebutuhan wilayah dan meratanya pembangunan, maka pendapatan yang diterima dari tahun ke tahun harus selalu ditingkatkan. Jika penerimaan yang diterima oleh suatu wilayah tinggi maka akan mudah untuk pemerintah melaksanakan pembangunan. Untuk dapat meningkatkan PAD, maka perlu diketahui rasio pertumbuhan PAD, dan kontribusi PAD dari tahun ke tahun. Rasio pertumbuhan PAD merupakan penilaian yang dilakukan dengan membandingkan besarnya penerimaan PAD pada tahun tertentu dengan PAD pada tahun sebelumnya. Sedangkan kontribusi PAD merupakan indikator penilaian yang dilakukan dengan melihat perbandingan antara tingkat realisasi masing – masing PAD dengan tingkat realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara keseluruhan. Secara keseluruhan penelitian ini dapat juga dilakukan sebagai bagian dari evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam mengelola PAD. Dengan menganalisis rasio pertumbuhan dan kontribusi PAD, pemerintah daerah dapat menilai sejauh mana kebijakan dan program yang telah dilaksanakan telah berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah.

Rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD) adalah sebuah indikator yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat pertumbuhan pendapatan yang dihasilkan oleh suatu daerah dari sumber-sumber pendapatan daerah. Rasio ini

mencerminkan kemampuan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya dari tahun ke tahun, yang merupakan salah satu ukuran keberhasilan dalam pengelolaan keuangan daerah. PAD yang mengalami peningkatan mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang positif, sedangkan penurunan dapat menjadi tanda masalah ekonomi. Dampak langsung dari pertumbuhan pajak adalah peningkatan pendapatan pemerintah, yang nantinya dapat digunakan untuk merencanakan pengeluaran dan mendukung proyek-proyek pembangunan daerah.

Analisis kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) merupakan sebuah proses evaluasi yang mendalam terhadap sumber-sumber pendapatan yang dihasilkan oleh suatu daerah. Pendapatan asli daerah adalah sumber pendapatan yang berasal dari potensi yang dimiliki oleh suatu daerah, seperti pajak, retribusi, hasil usaha milik daerah, dan lain-lain PAD yang sah. Analisis kontribusi PAD sangat penting untuk memahami seberapa besar peran pendapatan daerah dalam mendukung keuangan pemerintah daerah, serta untuk merencanakan strategi pengelolaan keuangan yang efektif. Sektor pajak daerah memiliki peran yang semakin besar karena akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Sumber pajak daerah diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah, dan pembangunan daerah untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Menurut Asih & Irawan (2003) kontribusi pajak sejatinya merupakan komponen PAD yang diperoleh dari pajak adalah iuran wajib diberikan oleh pemerintah daerah kepada penduduk, tanpa harus memberikan kontraprestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah. Memahami kontribusi setiap pajak memungkinkan pemerintah merencanakan anggarannya dengan lebih efektif.

Analisis kontribusi membantu menentukan tingkat pendapatan yang dapat diandalkan dari setiap jenis pajak untuk mendukung program dan kebijakan pemerintah. Selain itu, analisis ini membantu mengidentifikasi pajak yang mewakili sumber pendapatan penting, sehingga memfokuskan pengembangan atau penyesuaian kebijakan perpajakan yang berdampak signifikan terhadap pendapatan. Informasi mengenai beban pajak juga dapat membantu pengambilan keputusan terkait perubahan sistem perpajakan, sehingga memungkinkan kita menilai dampak perubahan tarif atau struktur pajak terhadap pendapatan dan perekonomian secara keseluruhan.

Mengacu pada latar belakang yang telah diuraikan, penulis mengambil judul **“ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2017 – 2022”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat rasio pertumbuhan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Tahun 2017 - 2022?
2. Seberapa besar kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Tahun 2017 - 2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui tingkat rasio pertumbuhan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Tahun 2017 - 2022.

2. Mengetahui seberapa besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Tahun 2017 - 2022.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh penulis yaitu:

1. Bagi pemerintah : Diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah melalui hasil pajak daerah, hasil retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan daerah.
2. Bagi penulis : Bermanfaat dalam meningkatkan ilmu pengetahuan tentang pendapatan yang ada di daerah dan dapat mengetahui pertumbuhan PAD dari tahun ke tahun, serta memperluas wawasan mengenai pendapatan asli daerah.
3. Bagi peneliti selanjutnya : Sebagai bahan referensi pembandingan bagi penelitian selanjutnya dalam memperkaya wawasan penelitian yang sudah ada.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dari penelitian ini sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah yang berkaitan dengan topik yang diangkat, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini akan menjelaskan teori dan tinjauan pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian, hasil penelitian sebelumnya.

BAB III METODE PENELITIAN

Bagian ini meliputi desain penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, Metode Analisis Data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum, hasil dan pembahasan dari pertumbuhan dan kontribusi pendapatan asli daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.

BAB V PENUTUP

Bagian ini meliputi kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan saran.

